

2026

RENCANA KERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan
Jl. Dewi Sartika No. 19 Pacitan



0357 886164



bpbd.pacitan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ini dilakukan sebagai penjabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Diharapkan Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2026 dan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sehingga terwujud Pemerintahan yang baik dan bersih.



Pacitan, 01 - 08 - 2025

**KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PACITAN**

ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM

NIP. 19790308 199711 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	4
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	7
	2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	7
	2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	17
	2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	18
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB IV	PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Ranwal Renja) merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Ranwal Renja Pembangunan BPBD Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga dalam penanganannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan di semua sektor.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Dengan demikian upaya penanganan bencana harus bersifat cepat, tepat, terpadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Pacitan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 (empat) yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Musyawarah Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pacitan.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Pacitan sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, target capaian program, kegiatan dan subkegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 ini akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2026 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 merupakan rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD tahun 2026 dimana RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2026 merupakan penjabaran dari RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2025-2029. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan terkait dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja BPBD Kabupaten Pacitan selaras dengan program dan kegiatan yang ada pada BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

Penyusunan Rencana Kerja tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Alam;
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja BPBD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah tahapan awal penyusunan dokumen Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2026.

Tujuannya adalah sebagai pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
- 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
- 2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 sampai dengan triwulan II dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sesuai penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16									
1	105.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	0	0	0,0	0	76,05	2.788.602.830,00	0	477.173.433,00	0	589.315.794,00	0	82.784.910,00	0	0	0	1.149.274.137,00	0	41,21	0	1.149.274.137,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	105.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	0,0	0	0,0	0	24,00	46.240.000,00	6	285.000,00	2	1.968.000,00	0	0	0	0	8	2.253.000,00	33,33	4,87	8	2.253.000,00	0	0			
	105.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,0	0	0,0	0	9	40.620.000,00	3	285.000,00	0	1.968.000,00	0	0	0	0	3	2.253.000,00	33,33	5,55	3	2.253.000,00	0	0			
	105.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,0	0	0,0	0	15	5.620.000,00	4	0	3	0	0	0	0	0	7	0	46,67	0	7	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		40	2,78					F				
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2						
	105.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	0,0	0	0,0	0	57,00	1.735.222.830,00	9	344.119.758,00	10	413.499.362,00	0	78.566.910,00	0	0	19	836.186.030,00	33,33	48,19	19	836.186.030,00	0	0			
	105.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	0,0	0	0,0	0	13,00	1.684.282.830,00	13	333.303.508,00	13	399.954.362,00	0	78.566.910,00	0	0	13	811.824.780,00	100	48,2	13	811.824.780,00	0	0			

		ASN	Tunjangan ASN																							
	105.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0.0 0	0	0.0 0	0	12	42.540.000,00	3	10.635.000,00	3	10.635.000,00	0	0	0	0	6	21.270.000,00	50	50	6	21.270.000,00	0	0	
	105.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0.0 0	0	0.0 0	0	45	8.400.000,00	9	181.250,00	9	2.910.000,00	0	0	0	0	18	3.091.250,00	40	36,8	18	3.091.250,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			63,33	45						F
Predikat kinerja(%)																			Rendah	Sangat Rendah		3	3			
	105.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	0.0 0	0	0.0 0	0	100.00	126.029.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	105.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0.0 0	0	0.0 0	0	1.00	126.029.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			0	0						F
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1			
	105.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasi operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi	0.0 0	0	0.0 0	0	100.00	244.060.768,00	22	56.271.548,00	18	44.337.444,00	0	0	0	0	40	100.608.992,00	40	41,22	40	100.608.992,00	0	0	
	105.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0.0 0	0	0.0 0	0	12	66.127.876,00	2	31.686.548,00	1	5.270.250,00	0	0	0	0	3	36.956.798,00	25	55,89	3	36.956.798,00	0	0	
	105.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0.0 0	0	0.0 0	0	12	41.937.892,00	3	4.833.000,00	3	10.748.950,00	0	0	0	0	6	15.581.950,00	50	37,15	6	15.581.950,00	0	0	
	105.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.0 0	0	0.0 0	0	12.00	135.995.000,00	2	19.752.000,00	3	28.318.244,00	0	0	0	0	5	48.070.244,00	41,67	35,35	5	48.070.244,00	0	0	

Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				38,89	42,8					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
105.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	0.00	0	0.00	0	100.00	411.934.332,00	12	57.552.127,00	25	106.332.988,00	0	0	0	0	37	163.885.115,00	37	39,78	37	163.885.115,00	0	0		
105.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0.00	0	0.00	0	12	248.830.332,00	3	19.608.193,00	3	64.865.302,00	0	0	0	0	6	84.473.495,00	50	33,95	6	84.473.495,00	0	0		
105.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0.00	0	0.00	0	12	163.104.000,00	3	37.943.934,00	3	41.467.686,00	0	0	0	0	6	79.411.620,00	50	48,69	6	79.411.620,00	0	0		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50	41,32					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
105.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	0.00	0	0.00	0	100.00	225.115.680,00	7	18.945.000,00	6	23.178.000,00	0	4.218.000,00	0	0	13	46.341.000,00	13	20,59	13	46.341.000,00	0	0		
105.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0.00	0	0.00	0	13	83.278.145,00	3	15.845.000,00	7	22.218.000,00	0	4.218.000,00	0	0	10	42.281.000,00	76,92	50,77	10	42.281.000,00	0	0		
105.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0.00	0	0.00	0	7	9.460.000,00	7	3.100.000,00	0	960.000,00	0	0	0	0	7	4.060.000,00	100	42,92	7	4.060.000,00	0	0		
105.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00	0	0.00	0	1.00	132.377.535,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				58,97	31,23					F
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah		3	3		

Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				26,11	25,78					
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2	105.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Nilai pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik	0	0	0.00	0	0.77	1.548.220.000,00	0	280.128.799,00	0	273.260.808,00	0	0	0	0	0	553.389.607,00	0	35,74	0	553.389.607,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	105.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0.00	0	0.00	0	100.00	135.000.000,00	9	37.730.000,00	34	23.532.600,00	0	0	0	0	43	61.262.600,00	43	45,38	43	61.262.600,00	0	0	
	105.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0.00	0	0.00	0	12239.00	135.000.000,00	###	37.730.000,00	###	23.532.600,00	0	0	0	0	###	61.262.600,00	45,58	45,38	###	61.262.600,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				45,58	45,38					
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	105.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.00	0	0.00	0	100.00	853.596.300,00	9	171.921.095,00	34	145.161.500,00	0	0	0	0	43	317.082.595,00	43	37,15	43	317.082.595,00	0	0	
	105.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas)	0.00	0	0.00	0	1.00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana																					
105.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal lama dalam 1 (satu) tahun	0.00	0	0.00	0	1.00	105.000.000,00	0	0	0	878.500,00	0	0	0	0	0	878.500,00	0	0,84	0	878.500,00	0	0
105.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0.00	0	0.00	0	1.00	1.000.000,00	0	0	0	664.000,00	0	0	0	0	0	664.000,00	0	66,4	0	664.000,00	0	0
105.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	0.00	0	0.00	0	1.00	390.389.175,00	2	91.349.000,00	0	92.240.500,00	0	0	0	0	2	183.589.500,00	200	47,03	2	183.589.500,00	0	0
105.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0.00	0	0.00	0	1.00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		64,58	25,69					F

Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah		10	10		
105.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0.00	0	0.00	0	95.00	97.423.700,00	84	31.805.500,00	0	15.961.500,00	0	0	0	0	84	47.767.000,00	88,42	49,03	84	47.767.000,00	0	0		
105.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0.00	0	0.00	0	1	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
105.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0.00	0	0.00	0	1	41.440.000,00	1	9.800.000,00	0	9.930.000,00	0	0	0	1	19.730.000,00	100	47,61	1	19.730.000,00	0	0			
105.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0.00	0	0.00	0	1.00	7.122.000,00	3	1.058.000,00	10	3.471.500,00	0	0	0	13	4.529.500,00	#####	63,6	13	4.529.500,00	0	0			
105.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0.00	0	0.00	0	180.00	42.461.700,00	21	20.947.500,00	56	0	0	0	0	77	20.947.500,00	42,78	49,33	77	20.947.500,00	0	0			
105.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	0.00	0	0.00	0	1.00	5.600.000,00	1	0	0	2.560.000,00	0	0	0	1	2.560.000,00	100	45,71	1	2.560.000,00	0	0			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		308,6	41,25					F		
Predikat kinerja(%)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		5	5				
105.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen dasar penanggulangan bencana	0.00	0	0.00	0	1.00	462.200.000,00	0	38.672.204,00	0	88.605.208,00	0	0	0	0	127.277.412,00	0	27,54	0	127.277.412,00	0	0			

105.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0.0 0	0	0.0 0	0	27.00	125.210.000,00	0	0	0	2.213.894,00	0	0	0	0	0	2.213.894,00	0	1,77	0	2.213.894,00	0	0	
105.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	0.0 0	0	0.0 0	0	39.00	200.000.000,00	3	7.229.570,00	8	58.426.814,00	0	0	0	0	11	65.656.384,00	28,21	32,83	11	65.656.384,00	0	0	
105.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0.0 0	0	0.0 0	0	2.00	136.990.000,00	0	31.442.634,00	0	27.964.500,00	0	0	0	0	0	59.407.134,00	0	43,37	0	59.407.134,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			9,4	25,99					F
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			43,61	39,78					
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																			0	38,48					

Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Total	4.336.822.830,00		1.702.663.744,00				
Persentase Realisasi Anggaran	39.26%						
Predikat	Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan yang direncanakan							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penyerapan anggaran yang lambat dan kurang maksimal							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Lebih fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perencanaan program dan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran (terukur) agar tercapai target kinerja							

2.2. ANALISIS KERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan merupakan unsur pelaksana, dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku kepala Ex Officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan sebelum bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

2.2.1. Pelayanan Penanganan Pra Bencana

Pelayanan Penanganan Pra/Sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Peningkatan akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini.
- b. Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana.
- c. Sosialisasi Penanggulangan Bencana.
- d. Pembangunan / pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

2.2.2. Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat

Pelayanan Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui kegiatan :

- a. Pencarian (search and rescue)
- b. Pertolongan pertama pada korban bencana
- c. Evakuasi
- d. Logistik / Dapur Umum

2.2.3. Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan setelah terjadinya bencana yang meliputi :

- a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi akibat bencana
- b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana
- c. Mengusulkan bantuan sosial dana rehabilitasi dan rekonstruksi
- d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

➤ Tingkat kinerja pelayanan BPBD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka BPBD Kab. Pacitan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai arah kebijakan dari pemerintah dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana, diantaranya :

1. Pembagian struktur penanganan bencana sampai dengan tingkat desa (desa tangguh);
2. Pembagian wilayah penanganan bencana sesuai dengan potensi bencana yang ada;
3. Penanganan sistem informasi kebencanaan yang terpusat di BPBD Kabupaten.

➤ **Permasalahan dan hambatan yang dialami BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi diantaranya :**

1. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut :

- a. Kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dll)
- b. Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana Pemerintahan banyak yang rusak dan tidak memadai. Hal ini sangat membahayakan bila terjadi bencana;
- c. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan penanganan penanggulangan bencana;
- d. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Pacitan dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Perangkat Daerah selain BPBD;
- e. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan;
- f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;

- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
- h. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan
- i. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

2. Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang tanggap darurat dan logistik sebagai berikut :

- a. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- c. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- d. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
- e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
- f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan.

3. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

- a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- b. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat;

- c. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
 - d. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;
 - e. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.
- **Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional :**
1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,
 2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada,
 3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,
 4. Menghargai budaya lokal,
 5. Membangun pasrtisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
 6. Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan,
 7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- **Adapun Tantangan yang dihadapi BPBD dalam meningkatkan pelayanan :**
1. Kondisi geografis Kabupaten Pacitan;
 2. Klasifikasi Badan yang masih tipe B;
 3. Belum adanya Peraturan Bupati mengenai Penanggulangan Bencana;
 4. Minimnya anggaran;
 5. Keterbatasan kualitas personil lembaga;
 6. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.
- **Peluang BPBD dalam meningkatkan pelayanan:**
1. Adanya proses bisnis perangkat daerah;
 2. Adanya SOP;
 3. Adanya Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan;
 4. Dukungan undang-undang;
 5. Pengalaman melaksanakan program penanggulangan bencana.

➤ **Formulasi isu-isu penting**

1. Penanganan Bencana bisa tersebar sampai kepada kelompok masyarakat terkecil (pembuatan desa tangguh);
2. Adanya Standar operasional prosedur penanggulangan bencana;
3. Sistem informasi yang terkoneksi ke seluruh wilayah rawan bencana;
4. Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam penanggulangan bencana;
5. Sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dari 7 (tujuh) arah kebijakan nasional tersebut yang menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian misi Bupati.

Adapun rumusan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas penanganan bencana

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana
Indikator : Persentase capaian SPM kebencanaan
2. Meningkatnya tata kelola pelayanan perangkat daerah yang akuntabel
Indikator : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 yang dituangkan dalam Bab ini adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab ini di danai oleh APBD Kabupaten Pacitan tahun 2026.

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah yang melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana maka wajib melaksanakan SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam menyusun Rencana Program Kegiatan BPBD Kabupaten Pacitan berpedoman pada Renstra BPBD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.

Pada Rencana Kerja tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan telah merencanakan untuk melaksanakan 2 (dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan, 36 (tiga puluh enam) subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.055.073.561,00 (Empat Milyar Lima Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran perangkat daerah pada tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan direncanakan akan melaksanakan 2 (dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan, 36 (tiga puluh enam) subkegiatan. Termasuk di dalamnya ada kegiatan utama dan kegiatan yang dilaksanakan rutin dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2026**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah		4.055.073.561,00					6.800.000.000,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4.055.073.561,00					6.800.000.000,00
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4.055.073.561,00					6.800.000.000,00
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	2.870.773.561,00			>B Nilai	3.575.000.000,00
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	24 dokumen	3.000.000,00			24 dokumen	20.000.000,00
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9 Dokumen	10.000.000,00
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	15 Dokumen	10.000.000,00
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	57 dokumen	1.730.086.161,00			57 Dokumen	1.870.000.000,00
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.688.966.161,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	16 Orang/bulan	1.770.000.000,00
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	38.760.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Dokumen	85.000.000,00

	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45 Laporan	2.360.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	45 Laporan	15.000.000,00
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %	1.000.000,00		100%	5.000.000,00
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	5.000.000,00
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	134.980.947,00		100%	400.000.000,00
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	35.528.407,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Paket	150.000.000,00
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.953.540,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Paket	75.000.000,00
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	87.499.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	18 Laporan	175.000.000,00
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	100 %	843.565.654,00		100%	930.000.000,00
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	133.843.654,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	270.000.000,00
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	709.722.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	660.000.000,00
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	158.140.799,00		100%	350.000.000,00
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	53.470.799,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	13 Unit	175.000.000,00
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.670.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Unit	25.000.000,00
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		150.000.000,00
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Nilai pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik	0,81	1.184.300.000,00		0,81 Nilai	3.225.000.000,00
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2,75 %	55.206.200,00		2,45 %	175.000.000,00
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	12.900 Orang	55.092.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	14.700 Orang	175.000.000,00
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						
						Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	113.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0 Dokumen	0,00

1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2,30 %	456.755.800,00			2,20 %	1.575.000.000,00
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota							
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	113.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Kegiatan	50.000.000,00	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota							
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	150 Unit	8.461.530,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 Unit	100.000.000,00	
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota							
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	5.113.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	300 Orang	150.000.000,00	
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	200 Keluarga	113.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 Keluarga	150.000.000,00	
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana							
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	150.113.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Menadi Kab. Pacitan, Pacitan, Purworejo Kab. Pacitan, Pacitan, Banjarsari Kab. Pacitan, Pacitan, Bolosingo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Kawasan	325.000.000,00	
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota							
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	24 Orang	23.266.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Orang	100.000.000,00	

1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	113.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	150.000.000,00
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	269.347.170,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	475.000.000,00
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	113.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Kawasan	75.000.000,00
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	90 %	134.924.600,00		80,60 %	365.000.000,00
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	320.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	5.000.000,00
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	100.000.000,00
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	16.425.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Orang	50.000.000,00
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						

						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	400 Orang	76.899.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	175 Orang	200.000.000,00
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1.280.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	10.000.000,00
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen dasar penanggulangan bencana	2 dokumen	537.413.400,00		2 dokumen	1.110.000.000,00
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
						Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	200.000.000,00
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	113.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	10.000.000,00
	1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
						Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	28 Orang	1.300.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Orang	150.000.000,00
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						
						Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	27 Orang	65.840.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	35 Orang	175.000.000,00
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						

						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	27 Kegiatan	210.025.063,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Kegiatan	400.000.000,00	
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota							
						Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	160.134.837,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	175.000.000,00	
	J U M L A H							4.055.073.561,00					6.800.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini merupakan penjabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Dalam rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi. Melalui rencana kerja ini akan dilihat indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan akan melaksanakan 2 (dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan, 36 (tiga puluh enam) subkegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.055.073.561,00 (Empat Milyar Lima Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)

Demikian Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ini disusun sebagai komitmen organisasi untuk dapat dicapai pada tahun ini dan semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan di Kabupaten Pacitan.